

SKRIP WAWANCARA

Narasumber 1 : Kepala Desa

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah pemerintah Desa Kepunten menggunakan atau menerapkan aplikasi sistem keuangan desa ?	Ya, pemerintah Desa Kepunten menggunakan aplikasi sistem keuangan desa yang disebut dengan SISKEUDES
2.	Apakah dengan penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini pelaporan keuangannya menjadi tepat waktu ?	Yang pasti pelaporannya tepat waktu karena kalau misalkan tidak tepat waktu maka otomatis akan mengganggu pelaporan yang lain karena SISKEUDES ini berurutan
3.	Apakah dengan penerapan sistem keuangan desa ini bisa mewujudkan akuntabilitas pemerintah desa kepunten ?	Sistem SISKEUDES itu memang sistem yang diterapkan dari pemerintah daerah kabupaten tujuan dari itu adalah untuk memperbaiki sistem keuangan di desa tentunya dan harapannya itu berurutan, sistematis dan bagus untuk keuangannya
4.	Apakah dengan penerapan sistem keuangan desa ini bisa membuat pemerintah desa kepunten transparan atas pertanggungjawaban APBDes ?	Untuk pertanggungjawaban APBDes sudah pasti transparan jadi sistem ini ngelink langsung ke inspektorat atau BPKP, bahkan bisa dilihat oleh semua orang untuk aplikasinya di pemerintahan bukan umum
5.	Apakah pemerintah desa kepunten juga transparan terkait pertanggungjawaban APBDes atau dana desa kepada Masyarakat desa kepunten sendiri ?	Kalau transparansi kita melalui Lembaga BPD untuk penggunaan dana desa karena menyusun anggaran atau menyusun program itu BPD kita tinggal melaksanakan dan kita musyawarah desa (MUSDES) kan dan secara otomatis kita transparansi ke Lembaga

Narasumber 2 : Kaur Keuangan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah pemerintah Desa Kepunten menggunakan atau menerapkan aplikasi sistem keuangan desa ?	Ya, pemerintah Desa Kepunten menggunakan aplikasi sistem keuangan desa atau SISKEUDES
2.	Sejak kapan pemerintah desa kepunten menerapkan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) ?	Dulu awalnya menggunakan aplikasi Cepet Mari itu untuk aplikasi dari kecamatan untuk SISKEUDES mulai dari tahun 2019 sebenarnya tahun 2018 sudah mulai transisi dari kabupaten tapi mulai riil dijalankan tahun 2019 untuk daerah kabupaten sidoarjo kalau 2017 dan 2018 masih transisi
3.	Sebelum menerapkan sistem keuangan desa pemerintah desa kepunten ini menggunakan apa untuk membuat laporan keuangan ?	Dulu laporan pertamanya Excel sama aplikasi dari kecamatan aplikasi Cepet mari itu aplikasinya sama administrasinya juga seperti SISKEUDES tapi Cepet Mari ini servernya Cuma Tingkat kecamatan setelah itu transisi 2019 itu memakai SISKEUDES 2019 masih offline 2020 sudah mulai online sampai

		sekarang jadi ngelink ke Kabupaten langsung untuk aplikasinya
4.	Apakah dengan penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini pelaporan keuangannya menjadi tepat waktu ?	Iya harus tepat waktu karena aplikasinya langsung ngelink dari kabupaten juga jadi harus ontime pelaporannya
5.	Apakah pemerintah desa ini mengalami kesulitan pada saat awal penerapan sistem keuangan desa ?	Untuk awal pasti mengalami kesulitan soalnya masih masa transisi jadi di awal ada pelatihan-pelatihan dari kabupaten, PMD, dan dari Inspektorat dan yang paling sering dari PMD dan sekarang sudah mulai lancar
6.	Apakah dengan penerapan sistem keuangan desa ini bisa mewujudkan akuntabilitas pemerintah desa keputen ?	Iya seharusnya bisa karena Inspektorat sudah bisa cek dari aplikasinya secara online misalnya anggaran A kabupaten sudah tahu desa A sudah menggunakan anggaran A mereka sudah tau sudah dikeluarkan dan sudah dilaksanakan untuk pengecekannya seharusnya bisa dari pusat lewat aplikasi itu
7.	Apakah dengan penerapan sistem keuangan desa ini bisa membuat pemerintah desa keputen transparan atas pertanggungjawaban APBDes ?	Iya soalnya kan laporannya sekarang sudah online semua jadi mesti harus sesuai dan lebih transparannya dari sistem tersebut
8.	Apakah pemerintah desa keputen juga transparan terkait pertanggungjawaban APBDes atau dana desa kepada Masyarakat desa keputen sendiri ?	Iya setiap setahun sekali kan ada untuk realisasi itu ada kayak poster awal tahun, awal tahun itu mencantumkan untuk anggaran realisasi tahun selesai sama untuk awal tahun itu mencantumkan awal tahun berjalan untuk banner biasanya dan banner itu kan ada banner realisasi berarti yang tahun kemarin yaitu tahun 2022 dan awal tahun 2023 itu ada APBDes lah untuk PAK sendiri ada di akhir ada poster juga jadi tiap tahun itu mesti ada poster realisasi dan APBDes itu bukti salah satu transparansi dari penggunaan dana desa terkait anggaran kegiatan

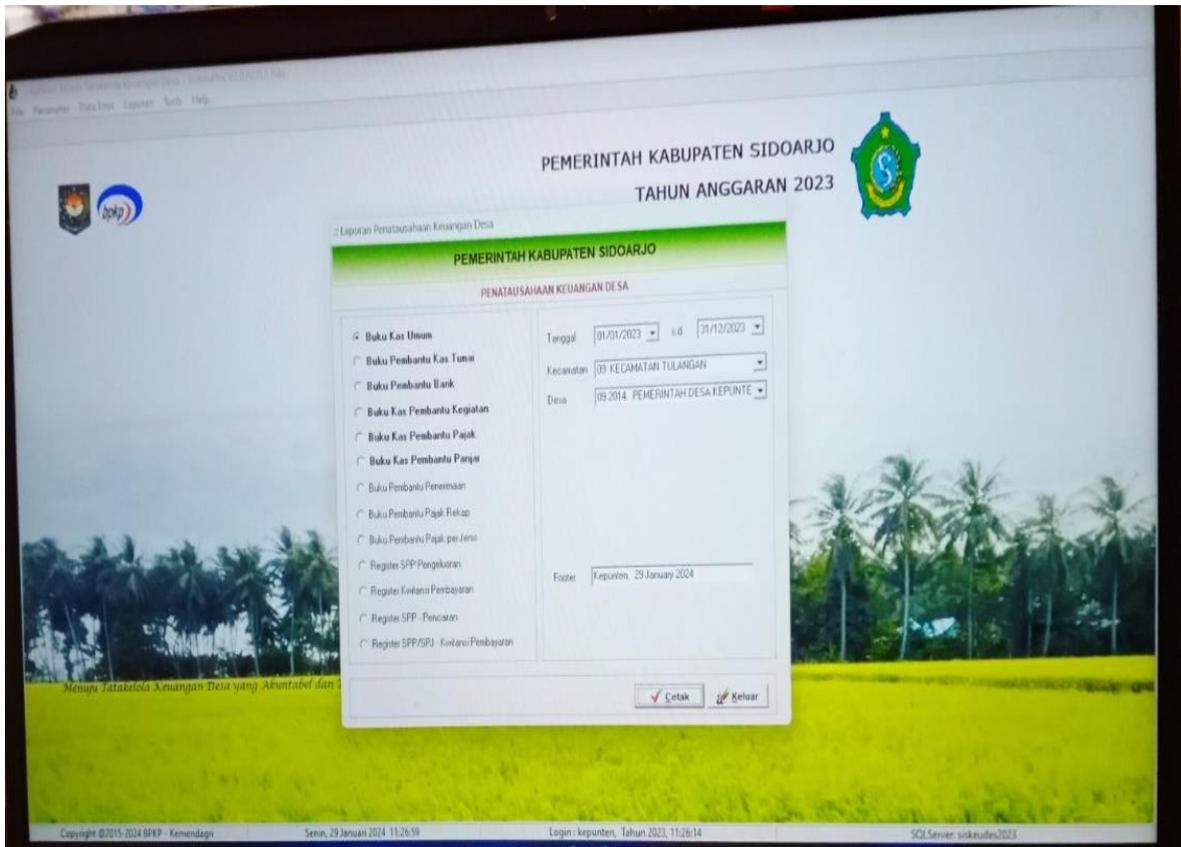
Narasumber 3 : Sekertariat Desa

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah pemerintah Desa Kepunten menggunakan atau menerapkan aplikasi sistem keuangan desa ?	Ya, pemerintah Desa Kepunten menggunakan aplikasi sistem keuangan desa yang disebut dengan SISKEUDES
2.	Apakah dengan penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini pelaporan keuangannya menjadi tepat waktu ?	Ya, tepat waktu dengan adanya aplikasi tersebut
3.	Apakah dengan penerapan sistem keuangan desa ini bisa mewujudkan akuntabilitas pemerintah desa keputen ?	Sistem SISKEUDES itu memang sistem yang diterapkan dari pemerintah daerah kabupaten tujuan dari itu adalah untuk satu secara pelaporan itu bisa tepat waktu dan bisa terakomodir secara keseluruhan tentang laporan keuangan intinya dengan adanya

		aplikasi target pemerintah kabupaten bisa tepat waktu pelaporannya dan akuntabel
4.	Apakah dengan penerapan sistem keuangan desa ini bisa membuat pemerintah desa keputen transparan atas pertanggungjawaban APBDes ?	Laporan pertanggungjawaban adalah akhir dari pembelanjaan dalam anggaran intinya di SISKEUDES itu nanti juga diketahui semua orang dengan adanya pelaporan melalui aplikasi SISKEUDES itu, dengan SISKEUDES itu semua orang bisa tau anggaran-anggaran dari pemerintah
5.	Apakah pemerintah desa keputen juga transparan terkait pertanggungjawaban APBDes atau dana desa kepada Masyarakat desa keputen sendiri ?	Karena anggaran desa ataupun dari sumber dana yang lain itu sebelum kita menggunakan kita adakan musyawarah desa jadi anggaran misal dari ADD, BHP, BHR, PAD bahkan DD itu sendiri kita paparkan dan untuk musyawarahnya dilakukan setiap awal mau merencanakan anggaran desa jadi setiap mau melakukan pra untuk rencana anggaran desa itu harus MUSDES, MUSDES yang dilakukan yaitu membekdown RKP/ rencana kerja pemerintah desa dari RPJM setelah membuat RKP kita membuat pra APBDes untuk merencanakan apa yang menjadi usulan dari warga Masyarakat yang termuat dalam RKP tersebut untuk penganggaran tahun berjalan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Aplikasi SISKEUDES



Lampiran 2. Laporan Buku Kas Umum

**BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA KEPUNTE
TAHUN ANGGARAN 2023**

KECAMATAN : KECAMATAN TULANGAN
KABUPATEN : KABUPATEN SIDOARJO
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Buku	Saldo Transak (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2023		Saldo Indentifikasi					
			Saldo Pembelian					
2	0001/2023		Saldo Operasional/Perkantoran (ATK, Listrik, Internet)	31.313.295,19	0,00		31.313.295,19	31.313.295,19
		3.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.950.000,00	0001/SPP/09.2014/2023	(1.950.000,00)	29.363.295,19
		3.2.3.01	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	1.042.000,00		(1.042.000,00)	18.321.295,19
		3.2.3.05	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	607.000,00		(607.000,00)	17.714.295,19
3	01/01/2023		AKSI (DAS) (MANGRO)					
		4.2.1.01	Akasi Desa Desa	31.302.000,00	0,00	0001/SPP/09.2014/2023	31.302.000,00	49.016.295,19
4	01/01/2023		Bunga Bank Simpanan					
		4.3.6.01	Bunga Bank	24.823,00	0,00	0001/SPP/09.2014/2023	24.823,00	49.041.118,19
5	01/01/2023		Penghasilan Tetap Kasual Desa Bekerja Simpanan					
		5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kasual Desa	0,00	3.725.000,00	0002/SPP/09.2014/2023	(3.725.000,00)	45.316.118,19
6	01/01/2023		Penghasilan Tetap Praktek Bekerja Simpanan					
		5.1.2.01	Penghasilan Tetap Praktek Bekerja	0,00	22.503.140,00	0003/SPP/09.2014/2023	(22.503.140,00)	22.813.078,19
7	01/01/2023		Monev/evaluasi SPP Desa 2 (Garis Bekerja Simpanan)					

Lampiran 3. Banner Realisasi Anggaran APBDes

